



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

Nomor B.955/SJ/KP.310/VIII/2024

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka mengisi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami mengajak Putra/Putri terbaik bangsa yang berkompeten untuk bergabung bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- C. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- D. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- E. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
- F. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Register Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024; dan

G. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024.

2. Kebutuhan jabatan, persyaratan kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, unit kerja penempatan serta kebutuhan umum yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas sebagaimana tercantum pada **Lampiran I dan Lampiran I.1**. Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud juga dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Kebutuhan Pengadaan CPNS, dibagi menjadi:
 - a. Kebutuhan umum; dan
 - b. Kebutuhan khusus, terdiri dari:
 - 1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian/Cumlaude”;
 - 2) Penyandang Disabilitas;
 - 3) Putra/Putri Kalimantan. Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan ketersediaan hunian.

Kebutuhan khusus sebagaimana tersebut, tercantum pada **Lampiran II**.

4. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Perkiraan jadwal pelaksanaan seleksi sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024

No	Kegiatan	Jadwal
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

5. Persyaratan Peserta

A. Persyaratan Umum Peserta, sebagai berikut:

- 1) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- 2) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- 3) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 4) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sebagai berikut:

- a) peserta dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/ atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; atau
 - b) peserta dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - c) peserta lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- 7) memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - 8) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - 9) tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
 - 10) berkelakuan baik;
 - 11) bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
 - 12) bersedia mengabdikan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
 - 13) tidak pernah melakukan dan/ atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
 - 14) tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
 - 15) peserta hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
 - 16) dalam hal peserta diketahui melamar:
 - 1) lebih dari 1 (satu) instansi dan/ atau jenis pengadaan dan/ atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
 - 2) menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/ atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

17) PPPK dapat melamar pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 dengan syarat, wajib memenuhi Masa Perjanjian Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan berkinerja baik serta mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang ditunjuk meliputi:

a) Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Pusat, meliputi:

- 1) Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan;
- 2) Pejabat pimpinan tinggi pratama di unit instansi vertikal kementerian/lembaga; dan/atau
- 3) Pejabat lain setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin satuan organisasi yang mandiri.

b) Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Daerah provinsi, meliputi:

- 1) Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan; dan/atau
- 2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.

c) Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Daerah kabupaten/kota, meliputi”:

- 1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.

B. Persyaratan wajib tambahan bagi Kebutuhan Khusus, sebagai berikut:

1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian/Cumlaude”

- a) Peserta yang merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- b) Peserta yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan, riset, dan teknologi.

2) Penyandang Disabilitas

- a) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- b) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari peserta dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

3) Putra/Putri Kalimantan

Peserta Putra/Putri Kalimantan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/ Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

C. Peserta penyandang disabilitas yang melamar kebutuhan umum juga wajib melampirkan persyaratan sebagaimana angka 2 huruf a) dan huruf b) serta wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas.

D. Peserta yang melamar pada kebutuhan jabatan fungsional kesehatan wajib melampirkan:

No	Jabatan	Dokumen
1	Dokter Gigi Ahli Pertama	Surat Tanda Register (STR) Bukan STR Internship
2	Perekam Medis Terampil	Surat Tanda Register (STR)

E. Persyaratan wajib tambahan bagi jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan adalah melampirkan sertifikat Keahlian ANKAPIN I atau ATKAPIN I. Jabatan ini akan berkarier menjadi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

F. Persyaratan wajib tambahan bagi jabatan awak kapal (kepelautan), sebagai berikut:

No	Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan		
		Sertifikat	Syarat Kesehatan/ Fisik	Kesehatan Mata
1	Juru Mudi Kapal Kelas I	1. Basic Safety Training (BST) 2. ANKAPIN I	1. Tidak memiliki riwayat penyakit jantung, operasi besar dan asma 2. Tidak bertato dan bertindik atau memiliki bekas tindik yang berlubang kecuali karena ketentuan adat 3. Tinggi badan minimal 160 cm	Tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan mata dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas
2	Juru Mudi Kapal Kelas II/ Juru Mudi Kapal Kelas III	1. Basic Safety Training (BST) 2. Minimal ANKAPIN II		
3	Masinis III Kapal Kelas II	1. Basic Safety Training (BST) 2. ATKAPIN I		
4	Masinis I Kapal Kelas IV	1. Basic Safety Training (BST) 2. Minimal ATKAPIN II		
5	Nakhoda	1. Basic Safety Training (BST) 2. ANKAPIN I		
6	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV	1. Basic Safety Training (BST) 2. ATKAPIN I		

No	Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan		
		Sertifikat	Syarat Kesehatan/ Fisik	Kesehatan Mata
7	Mualim I Kapal Kelas II	1. Basic Safety Training (BST) 2. ANKAPIN I		
8	Mualim I Kapal Kelas IV	1. Basic Safety Training (BST) 2. Minimal ANKAPIN II		
9	Kelasi dan Juru Minyak	Basic Safety Training (BST)		

6. Tahapan Seleksi

Seleksi pengadaan CPNS terdiri terdiri atas 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Penjelasan tahapan seleksi sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi pendidikan dengan dokumen pesertaan.
- b. SKD menggunakan CAT BKN, meliputi:
 - 1) Tes wawasan kebangsaan;
 - 2) Tes intelegensia umum; dan
 - 3) Tes karakteristik pribadi.

Materi SKD sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Nilai ambang batas SKD, sebagai berikut:

No	Materi	Jumlah Soal	NAB		
			Umum dan Putra/Putri Kalimantan	Lulusan Terbaik "Cumlaude"	Penyandang Disabilitas
1	TWK	30	65	-	-
2	TIU	35	80	85	60
3	TKP	45	166	-	-

No	Materi	Jumlah Soal	NAB		
			Umum dan Putra/Putri Kalimantan	Lulusan Terbaik "Cumlaude"	Penyandang Disabilitas
	Nilai Kumulatif		-	311	286

Peserta pada Pengadaan CPNS Tahun 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2023. Ketentuan peserta yang memilih menggunakan nilai SKD Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

c. SKB

Peserta yang dapat mengikuti SKB sebagai berikut:

- 1) Jumlah peserta ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
- 2) Dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.
- 3) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap peserta diikutkan SKB.

SKB Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024, meliputi:

- 1) SKB menggunakan CAT BKN;
- 2) SKB Tambahan, meliputi:
 - a) Psikotes
 - b) *Leaderless Group Discussion* (LGD)
 - c) Tes Pengamatan Fisik dan Kesamaptaan, khusus untuk jabatan kelompok Awak Kapal (kepelautan)

Bobot Penilaian SKB, sebagai berikut:

No	Jabatan	Bobot			
		CAT SKB	Psikotes	LDG	Pengamatan Fisik dan Kesamaptaan
1	Seluruh Jabatan kecuali Jabatan Juru Minyak, Juru Mudi, Kelasi Kapal, Kepala Kamar Mesin Kapal, Masinis, Muallim dan Nakhoda	50% dari total SKB keseluruhan	25% dari total SKB keseluruhan	25% dari total SKB keseluruhan	-
2	Jabatan Juru Minyak, Juru Mudi, Kelasi Kapal, Kepala Kamar Mesin Kapal, Masinis, Muallim dan Nakhoda		15% dari total SKB keseluruhan	15% dari total SKB keseluruhan	20% dari total SKB keseluruhan

7. Lokasi SKD dan SKB dengan CAT

- Pelaksanaan SKD dan SKB dengan CAT bertempat di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara atau lokasi luar negeri yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- Lokasi pelaksanaan SKB Tambahan dilaksanakan secara daring/online melalui *zoom meeting*.
- Lokasi tes Kesehatan dan kesamampuan akan ditentukan menyesuaikan Lokasi SKB CAT peserta

8. Dokumen Persyaratan Yang Di Unggah

Peserta mengunggah **dokumen asli** dalam bentuk *scan* ke <https://sscasn.bkn.go.id> , yang meliputi:

- Surat Lamaran yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai. Format tercantum pada Lampiran III;
- Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai. Format tercantum pada Lampiran IV;
- Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL;
- Ijazah Asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif

(IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- f. Ijazah SMA/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/ atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- g. Daftar Nilai asli SMA/ sederajat;
- h. Pasfoto format terbaru berlatar belakang berwarna merah;
- i. Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot) pada PDDIKTI/ BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada saat kelulusan;
- j. Surat Tanda Register bagi peserta yang melamar pada kebutuhan jabatan fungsional kesehatan;
- k. Surat keterangan tidak buta warna dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas khusus kelompok jabatan awak kapal (kepelautan);
- l. Sertifikat wajib tambahan bagi jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan serta Awak Kapal (kepelautan);
- m. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya bagi peserta kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas yang melamar kebutuhan umum;
- n. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari peserta dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar bagi peserta kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas yang melamar kebutuhan umum;
- o. Surat persetujuan mengikuti Pengadaan CPNS Tahun Anggaran bagi Peserta PPPK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk. Keterangan Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum pada **angka 5 Persyaratan Peserta huruf A angka 17**). Format persetujuan tercantum pada Lampiran V.

9. e-meterai

- a. Surat lamaran dan surat pernyataan wajib menggunakan e-meterai.
- b. 1 (satu) e-meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) dokumen;
- c. Posisikan e-meterai dan diletakkan disebelah tanda tangan serta tidak menimpa gambar atau tulisan apapun agar tidak mengganggu proses validasi; dan
- d. Pastikan dokumen yang telah dibubuhkan e-meterai sudah terunggah sebelum submit/ menyelesaikan pendaftaran.

10. Alur Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal 20 Agustus s.d. 6 September 2024, dengan alur sebagai berikut:

- a. Peserta membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Lengkapi semua data diri, dan pastikan semua data yang dimasukkan benar, lalu klik proses pendaftaran akun;
- c. Cetak informasi pendaftaran;
- d. Login pendaftaran kemudian isi data diri;
- e. Masukkan NIK dan password sesuai dengan saat mendaftar;
- f. Lengkapi data diri;
- g. Pilih jenis seleksi dan isi data formasi yang telah ditentukan;
- h. Unggah seluruh dokumen dan pastikan semua dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan persyaratan;
- i. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan peserta tidak lulus seleksi administrasi;
- j. Simpan data yang telah dicek pada "*form resume*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
- k. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

11. Pengolahan Nilai Akhir

Pengolah nilai akhir sebagai berikut:

- A. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB, dengan ketentuan SKD sebesar 40% (empat puluh persen) dan SKB sebesar 60% (enam puluh persen);
- B. Peserta dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik;
- C. Dalam hal pengisian kebutuhan belum terpenuhi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari peserta pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/ lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
 - 2) Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari peserta pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik;

- 3) Dalam hal sebagaimana angka 1) dan angka 2) belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Ketentuan ini dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan Putra/Putri Papua.

D. Pengolah nilai dan penentuan kelulusan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

12. Pembatalan Kelulusan

- a. Bagi Peserta kelompok Jabatan Awak Kapal (kepelautan) yang telah dinyatakan lulus melalui pengolahan nilai akhir dan melanjutkan proses usul penetapan NIP calon PNS, wajib melampirkan surat keterangan sehat jasmani sesuai dengan standar kesehatan kepelautan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut. Apabila dari pemeriksaan kesehatan tersebut tidak memenuhi standar kesehatan kepelautan, panitia akan membatalkan kelulusan yang bersangkutan.
- b. Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus melalui pengolahan nilai akhir dan melanjutkan proses usul penetapan NIP calon PNS, wajib melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan Rohani, dan apabila rekomendasi dari dokter menyatakan bahwa peserta belum memenuhi syarat/ tidak memenuhi syarat maka panitia akan membatalkan kelulusan yang bersangkutan.

13. Ketentuan Lainnya

- a. Prinsip pengadaan ASN KKP adalah kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak dipungut biaya;
- b. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan.
- c. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS;

- d. Apabila ditemukan paham radikalisme pada peserta saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS;
- e. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang dinyatakan lulus dan memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan PANSELNAS;
- f. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dapat menghubungi *Call Center* setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB melalui:
 - a. Website <http://ropeg.kkp.go.id>
 - b. *Whatsapp* pada nomor 0851-5889-8203
 - c. *Instagram @rosdmaokkp*
 - d. *Telepon (021) 3519070 Ext. 2094 atau (021) 3520338*

Jakarta, 19 Agustus 2024
Sekretaris Jenderal,
selaku
Ketua Panitia Pengadaan ASN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2024



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

**LOWONGAN JABATAN FORMASI UMUM
 PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN FORMASI TAHUN 2024**

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
1	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	D-IV Analisis Kimia / D-IV Biologi / D-IV Teknologi Akuakultur / S-1 Akuakultur / S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan / S-1 Budidaya Perairan / S-1 Budidaya Perikanan / S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya / S-1 Kimia / S-1 Biologi / S-1 Sosial Ekonomi Perikanan / S-1 Lingkungan / S-1 Agribisnis Perikanan / S-1 Agribisnis Perikanan / S-1 Ilmu Perikanan / S-1 Bioteknologi / S-1 Perikanan Budidaya / S-1 Sumber Daya Perairan / S-1 Sains Perikanan / S-1 Sumber Daya Akuatik	9	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi analisis dan perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan / pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya	7.600.000	8.300.000
2	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	D-IV Kelautan / D-IV Perikanan / S-1 Kelautan / S-1 Perikanan	3	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri	7.800.000	8.200.000
3	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	D-IV Sosial Ekonomi Perikanan / D-IV Geografi / D-IV Biologi / D-IV Antropologi / D-IV Oseanografi / D-IV Kewirausahaan / D-IV Manajemen Sumber Daya Alam / D-IV Pariwisata / D-IV Kimia / D-IV Sosiologi / D-IV Arkeologi / D-IV Ilmu Kelautan / D-IV Perencanaan Wilayah / D-IV Ilmu Lingkungan / D-IV Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan / D-IV Pengelolaan Sumber Daya Alam / D-IV Sains Lingkungan / D-IV Teknik Rekayasa Kelautan / D-IV Teknik Rekayasa Lingkungan / D-IV Teknik Rekayasa Sipil / S-1 Ilmu Lingkungan / S-1 Perencanaan Wilayah / S-1 Kewirausahaan / S-1 Ekonomi Sumber Daya / S-1 Manajemen Sumber Daya Alam / S-1 Ilmu Kelautan / S-1 Kimia / S-1 Oseanografi / S-1 Pariwisata / S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan / S-1 Antropologi / S-1 Arkeologi / S-1 Sosiologi / S-1 Biologi / S-1 Geografi / S-1 Sosial Ekonomi Perikanan / S-1 Sains Lingkungan / S-1 Pengelolaan Sumber Daya Alam / S-1 Teknik Rekayasa Kelautan / S-1 Teknik Rekayasa Lingkungan / S-1 Teknik Rekayasa Sipil / D-IV Ekonomi Sumber Daya	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Tidak Dapat	Jabatan profesional yang secara nasional bertanggungjawab melakukan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	7.600.000	7.800.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	Tidak Dapat			

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	D-IV Sosial Ekonomi Perikanan / D-IV Geografi / D-IV Biologi / D-IV Antropologi / D-IV Oseanografi / D-IV Kewirausahaan / D-IV Manajemen Sumber Daya Alam / D-IV Pariwisata / D-IV Kimia / D-IV Sosiologi / D-IV Arkeologi / D-IV Ilmu Kelautan / D-IV Perencanaan Wilayah / D-IV Ilmu Lingkungan / D-IV Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan / D-IV Pengelolaan Sumber Daya Alam / D-IV Sains Lingkungan / D-IV Teknik Rekayasa Kelautan / D-IV Teknik Rekayasa Lingkungan / D-IV Teknik Rekayasa Sipil / S-1 Ilmu Lingkungan / S-1 Perencanaan Wilayah / S-1 Kewirausahaan / S-1 Ekonomi Sumber Daya / S-1 Manajemen Sumber Daya Alam / S-1 Ilmu Kelautan / S-1 Kimia / S-1 Oseanografi / S-1 Pariwisata / S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan / S-1 Antropologi / S-1 Arkeologi / S-1 Sosiologi / S-1 Biologi / S-1 Geografi / S-1 Sosial Ekonomi Perikanan / S-1 Sains Lingkungan / S-1 Pengelolaan Sumber Daya Alam / S-1 Teknik Rekayasa Kelautan / S-1 Teknik Rekayasa Lingkungan / S-1 Teknik Rekayasa Sipil / D-IV Ekonomi Sumber Daya	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak	Tidak Dapat	Jabatan profesional yang secara nasional bertanggungjawab melakukan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	7.600.000	7.800.000
1			Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	Tidak Dapat	Jabatan profesional yang secara nasional bertanggungjawab melakukan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	7.600.000	7.800.000	
1			Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang	Tidak Dapat				
1			Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong	Tidak Dapat				

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	D-IV Sosial Ekonomi Perikanan / D-IV Geografi / D-IV Biologi / D-IV Antropologi / D-IV Oseanografi / D-IV Kewirausahaan / D-IV Manajemen Sumber Daya Alam / D-IV Pariwisata / D-IV Kimia / D-IV Sosiologi / D-IV Arkeologi / D-IV Ilmu Kelautan / D-IV Perencanaan Wilayah / D-IV Ilmu Lingkungan / D-IV Pengelolaan Sumber Daya Alam / D-IV Sains Lingkungan / D-IV Teknik Rekayasa Kelautan / D-IV Teknik Rekayasa Lingkungan / D-IV Teknik Rekayasa Sipil / S-1 Ilmu Lingkungan / S-1 Perencanaan Wilayah / S-1 Kewirausahaan / S-1 Ekonomi Sumber Daya / S-1 Manajemen Sumber Daya Alam / S-1 Ilmu Kelautan / S-1 Kimia / S-1 Oseanografi / S-1 Pariwisata / S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan / S-1 Antropologi / S-1 Arkeologi / S-1 Sosiologi / S-1 Biologi / S-1 Geografi / S-1 Sosial Ekonomi Perikanan / S-1 Sains Lingkungan / S-1 Pengelolaan Sumber Daya Alam / S-1 Teknik Rekayasa Kelautan / S-1 Teknik Rekayasa Lingkungan / S-1 Teknik Rekayasa Sipil / D-IV Ekonomi Sumber Daya	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	Tidak Dapat	jabatan profesional yang secara nasional bertanggungjawab melakukan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	7.600.000	7.800.000
4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D-IV Administrasi Publik / D-IV Studi Kebijakan Publik / D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik / D-IV Ilmu Administrasi Negara / S-1 Administrasi Negara / S-1 Teknik Informatika / S-1 Manajemen / S-1 Studi Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik	1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Dapat	melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	7.600.000	7.900.000
5	Arsiparis Terampil	D-III Administrasi Perkantoran / D-III Administrasi Bisnis / D-III Kearsipan	1	Inspektorat Jenderal Inspektorat V	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan peraturan yang berlaku	6.400.000	6.700.000
		D-III Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan / D-III Teknologi Komputer / D-III Administrasi Perkantoran / D-III Teknologi Informasi / D-III Perpustakaan / D-III Sistem Informasi / D-III Kearsipan	1	Sekretariat Jenderal Biro Hukum	Tidak Dapat	melaksanakan kegiatan kearsipan pada lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan perguruan tinggi negeri.	6.400.000	6.700.000
		D-III Informasi Perpustakaan dan Kearsipan / D-III Ilmu Informasi / D-III Sekretaris / D-III Kesekretariatan / D-III Manajemen Informasi dan Dokumen / D-III Administrasi Perkantoran / D-III Administrasi Bisnis / D-III Kearsipan / D-III Manajemen Administrasi / D-III Manajemen Perkantoran	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pembinaan persuratan dan kearsipan, pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	6.400.000	6.700.000
		D-III Informasi Perpustakaan dan Kearsipan / D-III Ilmu Informasi / D-III Sekretaris / D-III Kesekretariatan / D-III Manajemen Informasi dan Dokumen / D-III Administrasi Perkantoran / D-III Administrasi Bisnis / D-III Kearsipan / D-III Manajemen Administrasi / D-III Manajemen Perkantoran	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Direktorat Ikan Air Payau	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pembinaan persuratan dan kearsipan, pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	6.400.000	6.700.000
6	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 Psikologi	1	Sekretariat Jenderal Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Tidak Dapat	melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur	7.600.000	7.900.000

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
7	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	D-III Perikanan / D-III Biologi / D-III Ilmu Gizi / D-III Teknologi Pangan dan Gizi / D-III Teknologi Pangan / D-III Kimia	17	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Mengumpulkan, mengidentifikasi data dan informasi terkait pengendalian sistem jaminan mutu, penerapan standardisasi pengujian mutu, harmonisasi dan penanganan kasus sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di bidang kelautan dan perikanan, dan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	6.000.000	6.400.000
8	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil	D-III Perikanan / D-III Biologi / D-III Ilmu Gizi / D-III Teknologi Pangan dan Gizi / D-III Teknologi Pangan / D-III Kimia	2	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	6.000.000	6.400.000
9	Auditor Ahli Pertama	S-1 Teknik Informatika / S-1 Teknik Sipil / S-1 Hukum	1	Inspektorat Jenderal Inspektorat II	Tidak Dapat	Melakukan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan	7.800.000	8.200.000
10	Auditor Terampil	D-III Akuntansi / D-III Manajemen / D-III Administrasi Bisnis	1	Inspektorat Jenderal Inspektorat I	Tidak Dapat	Melakukan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan	6.200.000	6.600.000
11	Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum)	Profesi Dokter Gigi	1	Sekretariat Jenderal Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa - Klinik Pratama Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Dokter berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di Departemen Kesehatan dan Instansi di Luar Departemen Kesehatan. Jabatan ini merupakan jabatan fungsional pada tingkat Madya pada jenjang fungsional dokter gigi. Jabatan ini berperan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	8.400.000	8.700.000
12	Dosen Asisten Ahli	S-2 Ilmu Kelautan / S-2 Teknologi Penangkapan Ikan	2	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong - Prodi Teknik Penangkapan Ikan	Tidak Dapat	Jabatan ini merupakan jenjang asisten ahli pada jabatan fungsional dosen yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat bidang kelautan dan perikanan	8.000.000	8.500.000

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Dosen Asisten Ahli	S-2 Ilmu Perikanan	2	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong - Prodi Teknik Budidaya Perikanan	Tidak Dapat	Jabatan ini merupakan jenjang asisten ahli pada jabatan fungsional dosen yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat bidang kelautan dan perikanan	8.000.000	8.500.000
		S-2 Ilmu Perikanan / S-2 Teknologi Hasil Perairan	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang - Program Studi Teknik Budidaya Perikanan	Tidak Dapat	Jabatan ini merupakan jenjang asisten ahli pada jabatan fungsional dosen yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	8.000.000	8.500.000
		S-2 Manajemen Sumber Daya Perairan / S-2 Pengelolaan Sumber Daya Perairan / S-2 Teknologi Penangkapan Ikan / S-2 Teknologi Hasil Perairan / S-2 Teknologi Perikanan Laut	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang - Program Studi Teknik Penangkapan Ikan	Tidak Dapat	Jabatan ini merupakan jenjang asisten ahli pada jabatan fungsional dosen yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	8.000.000	8.500.000
		S-2 Pariwisata Berkelanjutan / S-2 Pariwisata	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi - Program Studi Ekowisata Bahari	Tidak Dapat	melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan dan pemanfaatan hypermedia pembelajaran	8.000.000	8.500.000
		S-2 Teknik Elektro	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong - Prodi Mekanisasi Perikanan	Tidak Dapat	Jabatan ini merupakan jenjang asisten ahli pada jabatan fungsional dosen yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat bidang kelautan dan perikanan	8.000.000	8.500.000

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Dosen Asisten Ahli	S-2 Teknik Elektro / S-2 Teknik Mesin / S-2 Teknik Perkapalan / S-2 Teknologi Penangkapan Ikan / S-2 Rekayasa Mesin / S-2 Rekayasa Perkapalan / S-2 Rekayasa Sistem Perkapalan	4	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang - Program Studi Mekanisasi Perikanan	Tidak Dapat	Jabatan ini merupakan jenjang asisten ahli pada jabatan fungsional dosen yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	8.000.000	8.500.000
		S-2 Teknik Industri	3	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai - Program Studi Permesinan Kapal	Tidak Dapat	Jabatan ini merupakan jenjang lektor pada jabatan fungsional dosen yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	8.000.000	8.500.000
		S-2 Teknik Industri / S-2 Teknologi Penangkapan Ikan / S-2 Teknologi Perikanan Laut	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai - Program Studi Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Jabatan ini merupakan jenjang lektor pada jabatan fungsional dosen yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	8.000.000	8.500.000
13	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	D-IV Biologi / D-IV Teknologi Pangan / D-IV Ilmu Gizi / D-IV Biokimia / D-IV Perikanan / D-IV Kimia / D-IV Teknologi Pangan dan Gizi / D-IV Bioteknologi / D-IV Mikrobiologi Pangan / D-IV Nutrisi Pangan / S-1 Teknologi Pangan dan Gizi / S-1 Ilmu Gizi / S-1 Perikanan / S-1 Kimia / S-1 Biokimia / S-1 Biologi / S-1 Teknologi Pangan / S-1 Bioteknologi / S-1 Mikrobiologi Pangan / S-1 Nutrisi Pangan	18	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balai BKIPM Denpasar	Tidak Dapat	Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan rencana kerja kegiatan, pengumpulan data bahan rencana kerja tahunan, pengolahan data bahan rencana kerja tahunan, persiapan perencanaan kegiatan, verifikasi lapangan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil kelautan dan perikanan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku	7.100.000	7.700.000
		D-IV Biologi / D-IV Teknologi Pangan / D-IV Ilmu Gizi / D-IV Perikanan / D-IV Kimia / D-IV Teknologi Pangan dan Gizi / D-IV Bioteknologi / D-IV Mikrobiologi Pangan / D-IV Nutrisi Pangan / S-1 Teknologi Pangan dan Gizi / S-1 Ilmu Gizi / S-1 Biokimia / S-1 Biologi / S-1 Bioteknologi	2	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balai BKIPM Denpasar	Tidak Dapat	Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan rencana kerja kegiatan, pengumpulan data bahan rencana kerja tahunan, pengolahan data bahan rencana kerja tahunan, persiapan perencanaan kegiatan, verifikasi lapangan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil kelautan dan perikanan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku	7.100.000	7.700.000
14	Juru Minyak Kapal Kelas I	SUPM Nautika Perikanan Laut / SUPM Penangkapan Ikan / SUPM Mesin Perikanan / SUPM Pengolahan Hasil Perikanan / SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan	15	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Tidak Dapat	Membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas	5.000.000	5.900.000

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
15	Juru Minyak Kapal Kelas II	SUPM Nautika Perikanan Laut / SUPM Penangkapan Ikan / SUPM Mesin Perikanan / SUPM Pengolahan Hasil Perikanan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Batam	Tidak Dapat	Membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas	5.600.000	5.900.000
		SUPM Nautika Perikanan Laut / SUPM Penangkapan Ikan / SUPM Mesin Perikanan / SUPM Pengolahan Hasil Perikanan / SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun PSDKP Kupang	Tidak Dapat	Membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas	5.600.000	5.900.000
		SUPM Teknik Perikanan Laut / SUPM Mesin Perikanan / SUPM Teknik Kapal Penangkap Ikan	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon	Tidak Dapat	Jabatan ini membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
16	Juru Minyak Kapal Kelas III	SUPM Nautika Perikanan Laut / SUPM Penangkapan Ikan / SUPM Mesin Perikanan / SUPM Pengolahan Hasil Perikanan / SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan	2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas	5.600.000	5.900.000
17	Juru Mudi Kapal Kelas I	D-IV Teknologi Penangkapan Ikan / D-IV Nautika	7	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Tidak Dapat	Menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikananbeserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000
18	Juru Mudi Kapal Kelas III	D-III Teknologi Penangkapan Ikan / D-III Nautika	2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikananbeserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000
			5	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Tidak Dapat	Menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikananbeserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
19	Kelasi Kapal Kelas I	SUPM Penangkapan Ikan / SUPM Mesin Perikanan / SUPM Pengolahan Hasil Perikanan / SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan / SUPM Nautika Perikanan	15	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Tidak Dapat	Menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
20	Kelasi Kapal Kelas II	SUPM Nautika Perikanan Laut / SUPM Penangkapan Ikan / SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal latih dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi kapal latih	5.600.000	5.900.000
		SUPM Penangkapan Ikan / SUPM Mesin Perikanan / SUPM Pengolahan Hasil Perikanan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Batam	Tidak Dapat	Menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
		SUPM Penangkapan Ikan / SUPM Mesin Perikanan / SUPM Pengolahan Hasil Perikanan / SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan / SUPM Nautika Perikanan	5	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
21	Kelasi Kapal Kelas IV	SUPM Nautika Perikanan Laut / SUPM Penangkapan Ikan / SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	Jabatan ini membantu Nakhoda atau mualimi untuk membantu melaksanakan pengamatan keliling	5.600.000	5.900.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai - Unit Penunjang	Tidak Dapat	Jabatan ini menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal latih dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan praktek laut	5.600.000	5.900.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang - Unit Penunjang	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan persiapan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan	5.600.000	5.900.000
		SUPM Penangkapan Ikan / SUPM Mesin Perikanan / SUPM Pengolahan Hasil Perikanan / SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan / SUPM Nautika Perikanan	12	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Kelasi Kapal Kelas IV	SUPM Penangkapan Ikan / SUPM Mesin Perikanan / SUPM Pengolahan Hasil Perikanan / SUPM Nautika Perikanan	8	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (B)	Tidak Dapat	Menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.900.000	6.100.000
22	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV	D-IV Permesinan Perikanan	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang - Unit Penunjang	Tidak Dapat	Jabatan ini Melakukan kegiatan manajemen terhadap permesinan dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada di atas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di bagian mesin	6.500.000	6.700.000
23	Masinis I Kapal Kelas IV	D-III Mekanisasi Perikanan / D-III Mesin dan Peralatan Perikanan / D-III Mesin Perikanan	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang - Unit Penunjang	Tidak Dapat	Jabatan ini melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan mesin induk	6.000.000	6.300.000
24	Masinis III Kapal Kelas II	D-IV Teknologi Penangkapan Ikan / D-IV Nautika	2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	membantu Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal Pengawas Perikanan Kelas I dalam mengatur, mengawasi, merawat, operasional dan mengontrol Mesin Genset (A/E) dan seluruh sistemnya dalam melaksanakan gelar operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan kapal pengawas perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dalam bidang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban awak Kapal Pengawas	6.000.000	6.300.000
25	Mualim I Kapal Kelas II	D-IV Teknologi Penangkapan Ikan	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, merencanakan pelayaran dan memimpin kapal jika nakhoda berhalangan	6.000.000	6.300.000
26	Mualim I Kapal Kelas IV	D-III Teknologi Penangkapan Ikan / D-III Teknik Penangkapan Ikan	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	Memeriksa peralatan navigasi, memastikan peralatan keselamatan pada kapal dalam keadaan yang layak pakai yang berlaku sesuai dengan peraturan pelayaran untuk digunakan pada saat melakukan pelayaran	6.000.000	6.300.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Dumai - Unit Penunjang	Tidak Dapat	Jabatan ini membantu utama Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan yang bertanggungjawab dalam administrasi operasional Kapal Latih Kelas IV dan Awak Kapal Latih Kelas IV, mengkoordinir Anak Buah Kapal Latih dan pelaksanaan tugas jabatan pada setiap Anak Buah Kapal Latih, laporan harian, laporan bulanan dan tahunan, laporan praktek laut, keselamatan pelayaran, serta membantu dalam pelaksanaan praktek laut	6.000.000	6.300.000

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
27	Nakhoda Kapal Kelas IV	D-IV Teknologi Penangkapan Ikan	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	Jabatan ini Melakukan kegiatan pada kapal negara sebagai komandan kapal dalam pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan pelayaran/maritim	7.900.000	8.300.000
28	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	D-IV Biologi / D-IV Teknologi Pangan / D-IV Kelautan / D-IV Ilmu Gizi / D-IV Perikanan / D-IV Kimia / D-IV Ilmu Pangan / S-1 Kelautan / S-1 Ilmu Gizi / S-1 Perikanan / S-1 Kimia / S-1 Biologi / S-1 Ilmu Pangan	2	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	7.600.000	7.800.000
29	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	D-IV Permesinan Perikanan / D-IV Teknologi Penangkapan Ikan	74	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melaksanakan identifikasi dan analisis pada bidang perikanan tangkap melalui penelaahan dan evaluasi rencana pengelolaan ikan dan kerja sama regional dan internasional terkait Pengelolaan Sumber Daya Ikan, penata kelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, perlindungan hak asasi manusia perikanan, penataan tata kelola pembangunan dan operasional serta kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, penata kelolaan perijinan bidang penangkapan ikan serta perlindungan dan diversifikasi usaha nelayan. Jabatan ini akan berkariir sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.	7.600.000	7.800.000
30	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	D-IV Geografi / D-IV Planologi / D-IV Perikanan / D-IV Lingkungan / D-IV Ilmu Kelautan / S-1 Ilmu Kelautan / S-1 Perikanan / S-1 Geografi / S-1 Lingkungan / S-1 Planologi	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Tidak Dapat	Jabatan ini berperan dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	7.600.000	8.300.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	Tidak Dapat	Jabatan ini berperan dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	7.600.000	8.300.000

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama		1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak	Tidak Dapat	Jabatan ini berperan dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	7.600.000	8.300.000
		D-IV Geografi / D-IV Planologi / D-IV Perikanan / D-IV Lingkungan / D-IV Ilmu Kelautan / S-1 Ilmu Kelautan / S-1 Perikanan / S-1 Geografi / S-1 Lingkungan / S-1 Planologi	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	Tidak Dapat	Jabatan ini berperan dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	7.600.000	8.300.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang	Tidak Dapat	Jabatan ini berperan dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	7.600.000	8.300.000
		D-IV Geografi / D-IV Planologi / D-IV Perikanan / D-IV Lingkungan / S-1 Ilmu Kelautan / S-1 Perikanan / S-1 Geografi / S-1 Lingkungan / S-1 Planologi	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	Tidak Dapat	Jabatan ini berperan dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	7.600.000	8.300.000
31	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	D-IV Farmasi / D-IV Analis Kimia / D-IV Biologi / D-IV Teknologi Akuakultur / S-1 Akuakultur / S-1 Kedokteran Hewan / S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan / S-1 Farmasi / S-1 Budidaya Perairan / S-1 Budidaya Perikanan / S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya / S-1 Kimia / S-1 Biokimia / S-1 Biologi / S-1 Lingkungan / S-1 Perikanan Budidaya / S-1 Sumber Daya Perairan	4	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	7.700.000	8.300.000

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
32	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 Teknik Sipil / S-1 Teknik Mesin / S-1 Teknik Elektro	1	Sekretariat Jenderal Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara	7.700.000	8.300.000
33	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	S-1 Hukum	1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Dapat	Merupakan jabatan profesional pada tingkat keahlian yang membutuhkan kemampuan dalam pengumpulan data peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, analisis mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai dengan tahapan pengesahan/penetapan atas peraturan perundang-undangan dan instrumen lainnya, menyusun konsep tanggapan peraturan perundang-undangan dan instrumen lainnya.	7.700.000	8.300.000
34	Perekam Medis Terampil	D-III Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan / D-III Perekam Medik Dan Informasi Kesehatan / D-III Rekam Medik / D-III Ilmu Rekam Medis / D-III Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan / D-III Rekam Medis	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan - Klinik Pratama Sekolah Tinggi Perikanan, Pasar Minggu	Tidak Dapat	melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	6.000.000	6.700.000
35	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D-IV Desain Grafis / D-IV Hubungan Masyarakat / D-IV Desain Komunikasi Visual / D-IV Manajemen Produksi Siaran / D-IV Komunikasi Massa / D-IV Manajemen Produksi Berita / D-IV Manajemen Informasi dan Komunikasi / S-1 Sistem dan Teknologi Informasi / S-1 Sistem Informasi / S-1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat / S-1 Manajemen Komunikasi / S-1 Periklanan / S-1 Komunikasi Pembangunan / S-1 Pendidikan Komputer / S-1 Desain Komunikasi Visual / S-1 Ilmu Komputer / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Jurnalistik / S-1 Komunikasi Massa / S-1 Hubungan Masyarakat / S-1 Administrasi Publik	1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.	8.000.000	8.500.000
36	Pranata Keuangan APBN Terampil	D-III Akuntansi	1	Sekretariat Jenderal Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Dapat	Mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, penyiapan analisis laporan keuangan instansi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.	7.000.000	7.400.000
		D-III Perbankan dan Keuangan / D-III Akuntansi / D-III Manajemen / D-III Manajemen Keuangan / D-III Sistem Informasi Akuntansi / D-III Manajemen Pajak	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	Tidak Dapat	melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	7.000.000	7.400.000

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
37	Pranata Komputer Ahli Pertama	D-IV Keamanan Sistem Informasi / D-IV Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis / D-IV Kecerdasan Buatan dan Robotik / D-IV Teknik Informatika / S-1 Sistem Informasi / S-1 Teknik Informatika / D-IV Rekayasa Keamanan Siber / S-1 Ilmu Komputer / S-1 Teknologi Informasi	1	Sekretariat Jenderal Pusat Data, Statistik, dan Informasi - Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.	7.900.000	8.300.000
		D-IV Kecerdasan Buatan dan Robotik	1	Sekretariat Jenderal Pusat Data, Statistik, dan Informasi	Tidak Dapat	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.	7.900.000	8.300.000
38	Pranata Komputer Terampil	D-III Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi / D-III Teknik Informatika	1	Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer	6.300.000	6.800.000
39	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	D-III Mekanisasi Perikanan / D-III Perikanan Tangkap / D-III Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan / D-III Teknologi Budidaya Perikanan / D-III Biologi / D-III Kimia	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	Menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium sebagai Anggota.	6.000.000	6.700.000
		D-III Permesinan Kapal / D-III Perikanan Tangkap / D-III Teknologi Pengolahan Hasil Laut	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	Tidak Dapat	Jabatan ini merupakan jenjang Terampil pada jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang untuk Melakukan pengelolaan Laboratorium.	6.000.000	6.700.000
		D-III Teknik Budidaya Perikanan / D-III Mekanisasi Perikanan / D-III Teknik Penangkapan Ikan	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	Tidak Dapat	Jabatan ini merupakan jenjang Keterampilan pada jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan terampil yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang untuk Melakukan pengelolaan Laboratorium pendidikan	6.000.000	6.700.000
40	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	D-III Kesekretariatan / D-III Manajemen / D-III Administrasi Perkantoran / D-III Manajemen Sumber Daya Manusia / D-III Administrasi Negara / D-III Administrasi Publik / D-III Manajemen Informatika / D-III Manajemen Perkantoran / D-III Manajemen Personalia	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.300.000	6.800.000
		D-III Manajemen / D-III Administrasi Perkantoran / D-III Manajemen Sumber Daya Manusia / D-III Administrasi Negara / D-III Administrasi Publik / D-III Manajemen Administrasi / D-III Manajemen Perkantoran / D-III Manajemen Personalia	1	Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.300.000	6.800.000
		D-III Teknologi Komputer / D-III Kesekretariatan / D-III Manajemen / D-III Administrasi Perkantoran / D-III Teknologi Informasi / D-III Sistem Informasi / D-III Manajemen Sumber Daya Manusia / D-III Administrasi Negara / D-III Administrasi Publik / D-III Manajemen Administrasi / D-III Manajemen Informatika / D-III Manajemen Perkantoran / D-III Teknik Informatika / D-III Teknik Komputer	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.300.000	6.800.000

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
41	Pustakawan Ahli Pertama	D-IV Perpustakaan Digital / S-1 Ilmu Perpustakaan / S-1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan / S-1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi / S-1 Perpustakaan dan Sains Informasi / S-1 Perpustakaan dan Ilmu Informasi	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi	Tidak Dapat	melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.	8.000.000	8.400.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	Tidak Dapat	melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.	8.000.000	8.400.000
		S-1 Ilmu Perpustakaan / S-1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	Tidak Dapat	melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.	8.000.000	8.400.000
42	Statistisi Ahli Pertama	D-IV Sains Data Terapan / S-1 Matematika / S-1 Statistika / S-1 Sains Data	1	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan	Tidak Dapat	melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik.	8.000.000	8.400.000
		S-1 Matematika / S-1 Statistika	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, penyajian, penyebarluasan dan analisis data, termasuk pula mengadakan suatu studi metodologi dari kegiatan statistik tersebut serta pembentukan model - model statistik guna keperluan perencanaan dan kebijakan di berbagai bidang	8.000.000	8.400.000
43	Teknisi Akuakultur Pemula	SMA IPA / SMK Agribisnis Perikanan / SMK Budidaya Ikan Air Tawar / SMK Budidaya Air Payau dan Laut / SMK Budidaya Ikan Laut / SMK Budidaya Kelautan	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	5.300.000	5.800.000
		SMA IPA / SMK Agribisnis Perikanan / SUPM Perikanan Budidaya / SMK Budidaya Ikan Air Tawar / SMK Budidaya Air Payau dan Laut / SMK Budidaya Ikan Laut / SMK Budidaya Kelautan	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	5.300.000	5.800.000
44	Teknisi Akuakultur Terampil	D-III Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya / D-III Perikanan Budidaya / D-III Budidaya Kelautan / D-III Teknologi Budidaya Perikanan / D-III Budidaya Perikanan / D-III Lingkungan / D-III Biologi / D-III Budi Daya Ikan / D-III Teknologi Perikanan Budidaya / D-III Kimia	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan perikanan budidaya	6.000.000	6.700.000
			2	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	6.000.000	6.700.000
		D-III Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya / D-III Perikanan Budidaya / D-III Budidaya Kelautan / D-III Teknologi Budidaya Perikanan / D-III Budidaya Perikanan / D-III Lingkungan / D-III Biologi / D-III Teknologi Perikanan Budidaya / D-III Kimia	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan perikanan budidaya	6.000.000	6.700.000

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
45	Teknisi Kesehatan Ikan Pemula	SMA IPA / SMK Agribisnis Perikanan / SMK Farmasi / SMK Analis Kimia / SMK Perikanan Budidaya / SUPM Perikanan Budidaya / SMK Budidaya Ikan Air Tawar / SMK Budidaya Air Payau dan Laut / SMK Budidaya Ikan Laut / SMK Budidaya Kelautan / SMK Kimia Analisis	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	Tidak Dapat	Teknisi Kesehatan Ikan Pemula merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan yang membutuhkan kemampuan melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan kesehatan ikan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan di bidang kesehatan ikan	5.300.000	5.800.000
46	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	D-III Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya / D-III Teknik Penanganan Patologi Perikanan / D-III Perikanan Budidaya / D-III Budidaya Kelautan / D-III Kesehatan Lingkungan / D-III Teknologi Budidaya Perikanan / D-III Budidaya Perikanan / D-III Lingkungan / D-III Analis Kimia / D-III Biologi / D-III Budi Daya Ikan / D-III Teknologi Perikanan Budidaya / D-III Kimia	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	6.000.000	6.700.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	6.000.000	6.700.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	6.000.000	6.600.000
			2	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	6.000.000	6.700.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	6.000.000	6.700.000
47	Widyaiswara Ahli Pertama	S-2 Administrasi Publik	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, menyusun kurikulum/GBPP, bahan ajar, bahan tayang, modul pendidikan dan pelatihan, soal ujian pendidikan dan pelatihan, modul pendidikan dan pelatihan, soal ujian pendidikan dan pelatihan, mengajar, membimbing./melatih, menjadi narasumber dan melaksanakan evaluasi program pendidikan dan pelatihan.	8.000.000	8.500.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, menyusun kurikulum/GBPP, bahan ajar, bahan tayang, modul pendidikan dan pelatihan, soal ujian pendidikan dan pelatihan, modul pendidikan dan pelatihan, soal ujian pendidikan dan pelatihan, mengajar, membimbing./melatih, menjadi narasumber dan melaksanakan evaluasi program pendidikan dan pelatihan.	8.000.000	8.500.000
			2	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, menyusun kurikulum/GBPP, bahan ajar, bahan tayang, modul pendidikan dan pelatihan, soal ujian pendidikan dan pelatihan, modul pendidikan dan pelatihan, soal ujian pendidikan dan pelatihan, mengajar, membimbing./melatih, menjadi narasumber dan melaksanakan evaluasi program pendidikan dan pelatihan.	8.000.000	8.500.000

Lampiran I.1 Pengumuman
 Nomor : B.955/SJ/KP.310/VIII/2024
 Tanggal : 19 Agustus 2024

**RENCANA UNIT KERJA PENEMPATAN
 PADA UNIT KERJA PENGELOMPOKAN DI DALAM SSCASN
 PENGADAAN CPNS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN FORMASI TAHUN 2024**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja Pengelompokan	Unit Kerja Penempatan
1	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1. Direktorat Ikan Air Laut 2. Direktorat Ikan Air Tawar 3. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau 4. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut 5. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya 6. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 7. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee 8. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan
2	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau 2. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut 3. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar 4. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sei Gelam
3	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Direktorat Direktorat Logistik 2. Direktorat Pemasaran 3. Direktorat Pemberdayaan Usaha
4	Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Pertama	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Direktorat Logistik 2. Direktorat Pengolahan
5	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Balai Besar KIPM Jakarta I 2. Balai KIPM Jakarta II 3. Balai KIPM Banjarmasin 4. Balai KIPM Entikong 5. Balai KIPM Ambon 6. Balai KIPM Lampung 7. Balai KIPM Manado 8. Balai KIPM Mataram 9. Balai KIPM Semarang 10. Balai KIPM Tanjung Pinang 11. Balai KIPM Tarakan 12. Stasiun KIPM Bandung 13. Stasiun KIPM Batam 14. Stasiun KIPM Ternate 15. Stasiun KIPM Yogyakarta 16. Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer
6	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1. Balai Besar Penangkapan Ikan 2. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon 3. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 4. Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 5. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 6. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 7. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 8. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan 9. Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 10. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 11. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga 12. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat 13. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan 14. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate 15. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual 16. Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang 17. Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 18. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 19. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 20. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 21. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari 22. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
7	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Balai KIPM Denpasar 2. Balai KIPM Balikpapan 3. Balai KIPM Banjarmasin 4. Balai KIPM Entikong 5. Balai KIPM Medan I 6. Balai KIPM Lampung 7. Balai KIPM Manado 8. Balai KIPM Mataram 9. Balai KIPM Semarang 10. Balai KIPM Tanjung Pinang 11. Balai KIPM Tarakan 12. Stasiun KIPM Bandung 13. Stasiun KIPM Jambi 14. Stasiun KIPM Kendari 15. Stasiun KIPM Mamuju 16. Stasiun KIPM Merauke 17. Pusat Manajemen Mutu

No	Nama Jabatan	Unit Kerja Pengelompokan	Unit Kerja Penempatan	
8	MASINIS III KAPAL KELAS II	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Pangkalan PSDKP Tual	2. Stasiun PSDKP Kupang
9	KELASI KAPAL KELAS II	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Direktorat Pengendalian Operasi Armada 2. Stasiun PSDKP Biak	3. Stasiun PSDKP Kupang 4. Stasiun PSDKP Pontianak
10	KELASI KAPAL KELAS IV	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Direktorat Pengendalian Operasi Armada 2. Pangkalan PSDKP Bena 3. Stasiun PSDKP Tahuna 4. Stasiun PSDKP Ambon 5. Stasiun PSDKP Kupang	6. Stasiun PSDKP Pontianak 7. Stasiun PSDKP Cilacap 8. Stasiun PSDKP Belawan 9. Stasiun PSDKP Biak 10. Stasiun PSDKP Tarakan
		Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (B)	1. Pangkalan PSDKP Jakarta 2. Pangkalan PSDKP Bitung	3. Pangkalan PSDKP Tual 4. Pangkalan PSDKP Batam
11	JURU MUDI KAPAL KELAS III	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Stasiun PSDKP Belawan	2. Stasiun PSDKP Cilacap
12	JURU MINYAK KAPAL KELAS III	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Pangkalan PSDKP Bena	2. Stasiun PSDKP Tarakan

**LOWONGAN JABATAN FORMASI KHUSUS
 PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN FORMASI TAHUN 2024**

Penyanggah Disabilitas

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
1	Pranata Keuangan APBN Terampil	D-III Akuntansi	1	Sekretariat Jenderal Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, penyiapan analisis laporan keuangan instansi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.	7.000.000	7.400.000
2	Widyaiswara Ahli Pertama	S-2 Manajemen	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, menyusun kurikulum/GBPP, bahan ajar, bahan tayang, modul pendidikan dan pelatihan, soal ujian pendidikan dan pelatihan, modul pendidikan dan pelatihan, soal ujian pendidikan dan pelatihan, mengajar, membimbing, menjadi narasumber dan melaksanakan evaluasi program pendidikan dan pelatihan.	8.000.000	8.500.000

Putra-Putri Kalimantan

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
1	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	D-IV Analisis Kimia / D-IV Biologi / D-IV Teknologi Akuakultur / S-1 Akuakultur / S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan / S-1 Budidaya Perairan / S-1 Budidaya Perikanan / S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya / S-1 Kimia / S-1 Biologi / S-1 Sosial Ekonomi Perikanan / S-1 Lingkungan / S-1 Agribisnis Perikanan / S-1 Agribisnis Perikanan / S-1 Ilmu Perikanan / S-1 Bioteknologi / S-1 Perikanan Budidaya / S-1 Sumber Daya Perairan / S-1 Sains Perikanan / S-1 Sumber Daya Akuatik	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Melakukan kegiatan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi analisis dan perumusan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang perikanan budidaya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya, pelaksanaan bimbingan / pendampingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya	7.600.000	8.300.000
2	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	D-IV Kelautan / D-IV Perikanan / S-1 Kelautan / S-1 Perikanan	2	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri	7.800.000	8.200.000

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 Teknik Sipil / S-1 Teknik Mesin / S-1 Teknik Elektro	1	Sekretariat Jenderal Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara	7.700.000	8.300.000

Lulusan Terbaik / *Cumlaude*

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
1	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 Psikologi	1	Sekretariat Jenderal Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur	7.600.000	7.900.000

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan RI
c.q. Ketua Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024
di –
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
Jabatan yang dilamar :
Pendidikan :
Universitas :
Alamat Domisili :
Nomor Telepon/Hp :
Alamat e-mail :
Akun IG/Twitter/FB :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024.

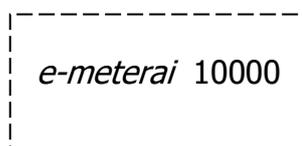
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan scan dokumen lamaran yang telah di unggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>, sebagai berikut:

1. Surat lamaran yang ditandatangani dan dibubuhkan e-meterai 10000;
2. Surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhkan e-meterai 10000;
3. e-KTP asli/ surat keterangan perekaman catatan kependudukan (asli *);
4. Ijazah asli/surat penyetaraan ijazah asli *);
5. Transkrip nilai asli/ transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai IPK (asli)/Nilai Ijazah asli/Daftar nilai asli (bagi SMA/ sederajat *);
6. Pas Foto berlatar belakang warna merah;
7. Sertifikat atau tangkap layar (screenshot) pada PDDIKTI/ BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada saat kelulusan;
8. Surat Tanda Register. (*Khusus bagi peserta yang melamar pada kebutuhan jabatan fungsional kesehatan* *);
9. Surat keterangan tidak buta warna dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas. (*Khusus kelompok jabatan awak kapal (kepelautan)* *);
10. Sertifikat wajib tambahan. (*Khusus bagi jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan serta Awak Kapal (kepelautan)* *);
11. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitas. (*Khusus bagi peserta kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas yang melamar kebutuhan umum* *);
12. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. (*Khusus bagi peserta kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas yang melamar kebutuhan umum* *);

13. Surat persetujuan mengikuti Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024. *(Khusus bagi Peserta PPPK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk*)*.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada Pengadaan CPNS KKP Tahun Anggaran 2024. Atas perhatian Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



ditandatangani
(*Nama Lengkap*)

Catatan:

1. Tanda *) hanya ditulis bagi jabatan yang mempersyaratkan atau pilih salah satu untuk dokumen yang diunggah;
2. e-meterai tidak menempel pada tulisan dan gambar apapun.

....., 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Jabatan yang dilamar :
Pendidikan pada saat melamar :
Universitas :
Alamat domisili :
Akun IG/Tik-Tok :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
6. Bersedia mengabdikan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Berkelakuan baik;
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;

13. Tidak memiliki riwayat penyakit jantung, operasi besar dan asma, Tidak bertato dan bertindik atau memiliki bekas tindik yang berlubang (kecuali karena ketentuan adat *),

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari ditemukan data dan informasi yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi Pengadaan CPNS KKP Tahun Anggaran 2024. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.



Hormat Saya,

ditandatangani
(*Nama Lengkap*)

Catatan:

1. Tanda *) hanya ditulis bagi jabatan yang mempersyaratkan atau pilih salah satu untuk dokumen yang diunggah;
2. e-meterai tidak menempel pada tulisan dan gambar apapun.

< KOP INSTANSI >

Surat Izin Mengikuti Seleksi Pengadaan CPNS

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 24 huruf (d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa ***dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb***, bersama ini saya memberikan izin kepada PPPK yang tersebut dalam lampiran surat ini untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon PNS tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila yang bersangkutan lulus dan ditetapkan sebagai Calon PNS, maka PPPK akan diberhentikan terhitung mulai tanggal penetapan Calon PNS;
2. Apabila yang bersangkutan tidak lulus seleksi pengadaan Calon PNS tahun 2024, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan kontrak kerjanya sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Proses seleksi tidak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di:

Pada Tanggal:

Jabatan Penandatanganan,

Nama Pejabat

Lampiran surat izin

Nomor :

Tanggal :

No	Nama PPPK	NI PPPK	NIK	Jabatan	Unit Kerja	Tanggal Awal Kontrak	Izin Instansi yang Dilamar
1 s.d. 100							